BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu bangsa sangat di pengaruhi oleh peran kinerja sektor publik. Bahkan bisa dikatakan, tidak mungkin ada negara jika tanpa sektor publik (pemerintahan). Negara indonesia yang merupakan negara pancasila, menjadikan sektor publik sebagai sektor terpenting dalam sistem ekonomi, sosial dan politik. Jika kita berbicara mengenai sektor publik sendiri, ini berkaitan erat dengan para pelaku pemerintahannya yaitu pegawai pemerintah. Dan tentunya ini berhubungan juga dengan kualitas kinerjanya.

Isu mengenai kinerja pegawai pemerintah sangat menjadi sorotan publik saat ini, karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut agar pemerintah dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintah di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

Untuk mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki

kualitas kinerja pemerintah itu sendiri. Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah (Santosa, Urip dan Yohanes: 2008).

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto,2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kualitas kinerjanya. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat di aplikasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah dan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan

difahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006 dalam Peggy Sande, 2013). Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo 2006). Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. (Mardiasmo, 2006)

Selain akuntabilitas kinerja, untuk menunjang kualitas kinerja pegawai pemerintah diperlukan pula tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*). Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi menyebabkan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah mengenai tata kelola pemerintah yang baik. Konsep *good governance* ini memiliki pengaruh dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan. Oleh karena itu respon terhadap *good governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup *concern* mengenai hal ini.

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2006 dalam Dedi Kusmayadi 2009).

Wiranto (2012:1) dalam Lucy Auditya dan Husaini (2013) mengatakan, bahwa *good governance* dapat difahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu Negara. *Good governance* memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum.

Untuk melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidak mudah. Ini memerlukan waktu yang lama dan usaha yang terus menerus. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik itu sendiri. (Leni Nofianti dan Novie Susanti Suseno, 2014)

Banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi di kalangan pemerintah, menyebabkan krisis kepercayaan publik. Seperti banyak kasus korupsi, kolusi dan kasus penyimpangan lainnya yang tidak hanya di temukan dalam pemerintah pusat, tetapi juga banyak ditemukan di pemerintah daerah.

Dari data yang diperoleh ICW pada tahun 2003 mengenai kejadian-kejadian korupsi di daerah, ditemukan 15 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat salah satunya di pemerintah daerah kabupaten Ciamis. Wakil bupati kabupaten Ciamis diduga melakukan tindakan korupsi terhadap dana APBD kabupaten

Ciamis tahun 2001/2002 saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis periode 1999/2004.

Selain itu, fenomena yang terjadi di dinas Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dadang Khaeruman (2013), menyatakan bahwa kualitas SDM di Dinas Kehutanan dan pekebunan kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis adalah Kualitas SDM yang masih kurang baik. Dengan kata lain SDM di dinas Kehutanan dan Perkebunan masih kurang dilihat dari segi profesionalismenya maupun di lihat dari jumlah pegawainya.

Hambatan lain adalah belum optimalnya sistem informasi manajemen Hutbun yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang baik dan benar. Selain itu data potesi Hutbun belum tersedia secara akurat sebagai bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dalam pengusahaan Hutbun. Pemanfaatan sumber daya hutan dan perkebunan cenderung masih kurang memperhatikan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan telah memicu konflik sosial yang menimbulkan tuntutan untuk merambah kawasan hutan dan perkebunan. Kualitas pegawai Dishutbun belum memadai sesuai dengan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga yang optimal serta kemampuan pemerinta daerah untuk membiayai pembangunan Hutbun masih terbatas; Upaya yang telah dilakukan oleh oleh Para Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis untuk mengatasi hambatan tersebut dalam menciptakan kinerja

dilihat dari Aspek Kualitas SDM dengan cara peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal.

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan- penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah dan dinas Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good government governance* yang belum maksimal dan pemerintah daerah kabupaten Ciamis belum optimal dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis yang masih harus diperbaiki.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan fenomena yang terjadi di pemerintah kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintah) di pemerintah daerah kabupaten Ciamis yang belum maksimal.
2. Kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis masih kurang baik.
3. Pertanggung jawaban (akuntabilitas kinerja) pegawai pemerintah masih kurang akuntabel.

Dari hasil penelitian sebelumnyaoleh Garnita, Nita (2008), Auditya, Lucy dan Husaini (2013) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikasn terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Novianti, Leny dan Novie Susanti Suseno (2014) bahwa implementasi *good government governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.Sedangkan menurut Soemantri Yusuf, Dedy

(2009) dan Yuanida, Meitika (2010) bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut dan berdasarkan fenomena-fernomena yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten Ciamis, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh *Good government governance* (GGG) dan Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Setelah meninjau dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten Ciamis masih belum dapat menerapkan GGG (*good government governance*) dengan baik.
2. Akuntabilitas kinerja di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis masih belum berjalan dengan baik.
3. Kualitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ciamis masih kurang baik karena masih banyak ditemukannya kecurangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang penelitian, masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *good government governance* (tata kelola pemerintah yang baik) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas (tata kelola pemerintah yang baik) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Seberapa besar pengaruh *good government governance* (tata kelola pemerintah yang baik) dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.2 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan data-data, informasi serta gambaran mengenai pengaruh *good governance* dan akuntabillitas terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Ciamis.

1.3.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *good government governance* (tata kelola pemerintah yang baik) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas (tata kelola pemerintah yang baik) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *good government governance* (tata kelola pemerintah yang baik) dan Akuntabilitas

terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

1.4 Kegunan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1.4.1.1 Bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis

Adapun kegunaan praktis yang dirasakan oleh setiap pegawai pemerintah yang bekerja di dinas pemerintah daerah kabupaten Ciamis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran, sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah daerah Kabupaten Ciamis lebih optimal.

1.4.1.2 Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas adalah meningkatnya kualitas kinerja dan dapat diterapkannya *good governance* lebih optimal. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan dapat tercipta pula kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sendiri menjadi pemerintah daerah yang dapat menjadi pemerintahan yang dapat dibanggakan oleh masyarakatnya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) **Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, uji kemampuan, serta mengetahui lebih jelas penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

2) Pengembangan Ilmu

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

3) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang diambil oleh penulis, mengenai pengaruh pelaksanaan *good governance* dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi informasi untuk peneliti selanjutnya.

4) Sebagai tugas akhir

Penelitian ini ditujukan sebagai tugas akhir perkuliahan, sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) di Universitas Komputer Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di dinas SKPD kabupaten Ciamis. Dinas SKPD pemerintah daerah kabupaten Ciamis terdiri dari 13 dinas yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun Waktu penelitian dalam penyelesaian tugas usulan penelitian ini adalah dimulai dari bulan April 2015.Tabel waktu penelitian:

Tahap	Prosedur	Bulan					
		April 2015	Mei 2015	Juni 2015	Juli 2015	Agsts 2015	Sept 2015
I	**Tahap Persiapan:**						
	a. Membuat outline dan proposal UP	■					
	b. Mengambil Formulir penyusunan skripsi	■					
	c. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan:**						
	a. Bimbingan UP	■					
	b. Acc UP	■					
	c. Pendaftaran seminar UP	■					
	d. Seminar UP	■					
	e. Revisi UP	■					
	f. Acc. Revisi UP	■					
	g. Penelitian Perusahaan	■					
	h. Bimbingan di perusahaan	■	■				
	i. Membuat outline dan proposal skripsi		■				
	j. Penyusunan skripsi		■	■			
	k. Bimbingan skripsi		■	■			
	l. Acc skripsi			■			
III	**Tahap Pelaporan:**						
	a. Menyiapkan draft skripsi			■	■		
	b. Sidang akhir skripsi				■		
	c. Revisi skripsi				■	■	
	d. Acc revisi skripsi					■	

	e. Penyempurnaan laporan skripsi						
IV	**Tahap Akhir:**						
	a. Wisuda						
	b. Penyerahan Laporan						